

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, dan negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan memberikan akses terhadap terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia. Pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing di era keterbukaan dan globalisasi. Pemerintah memimpin gerakan nasional untuk mewajibkan pendidikan dan memberantas buta huruf. Upaya ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan.

Pendidikan adalah suatu proses sosial untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan generasi sebelumnya kepada generasi mendatang, melestarikan, memelihara, dan mengembangkannya. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan tidak lepas dari peran negara sebagai penguasa. Artinya, kompleksitas, isi, dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan yang disediakan oleh masyarakat sangat bervariasi dan memerlukan lembaga serta intervensi pemerintah untuk memelihara dan mengembangkannya secara terpadu dan berkualitas tinggi, karena hal tersebut diperlukan.

Tujuan Pendidikan juga ditungakan dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia ke empat yang berbunyi

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”

Berdasarkan hasil survei pendidikan menengah global tahun 2018 yang dilakukan oleh PISA (Program for International Student Assessment) pada tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat rendah yaitu pada peringkat 74 dari 79 negara yang disurvei. Dengan kata lain, Indonesia menduduki peringkat ke-6 terbawah dibandingkan negara lain (Susiani, 2021).

Data tahun 2022: 22,56% penduduk Indonesia tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, 29,97% tamat sekolah menengah atas atau sederajat, hanya 10,15% yang tamat pendidikan tinggi, dan sisanya 37,32% tamat sekolah dasar atau sederajat. Pada tahun 2022, rata-rata lama bersekolah penduduk usia 15 tahun ke atas tetap sebesar 9,08 tahun atau setara dengan tahun ketiga sekolah menengah pertama (BPS, 2023)

Data jumlah penduduk berdasarkan tamat jenjang Pendidikan dari tahun 2020-2022 dapat dilihat melalui table berikut

Tabel 1. 1 Jumlah penduduk berdasarkan jenjang tamat Pendidikan 2020-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Tamat Pendidikannya (juta jiwa)		
	SD/sederajat	SMP/sederajat	SMA/sederajat
2020	63,27	31,11	37,64
2021	64,44	39,67	56,15
2022	64,84	40,03	57,53

Sumber: BPS(2023)

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan jenjang tamat Pendidikan menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami kenaikan, pada tahun 2020 tamatan SD mencapai 63,27 juta jiwa, SMP mencapai 31,11 juta jiwa, SMA mencapai 37,64 juta jiwa. Pada tahun 2021 tamatan SD mencapai 64,44 juta jiwa, SMP mencapai 39,67 juta jiwa, SMA mencapai 56,15 juta jiwa. Pada tahun 2022 tamatan SD mencapai 64,84 juta jiwa, jauh lebih tinggi dibanding dengan tamatan SMP yaitu 40,03 juta jiwa dan SMA 57,53 juta jiwa.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah secara jelas dan nyata mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah jelas dijabarkan ketentuan prioritas pelayanan minimal di mana urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.

Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di mana SPM pendidikan adalah urusan pemerintah wajib yang

berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Target dan indikator kinerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang menargetkan Pendidikan Menengah Jumlah warga negara usia 16-18 yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah dengan target 100%.

Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian SPM bidang pendidikan demi memastikan setiap warga negara menerima pelayanan SPM sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Tahun 2020 Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang telah melaksanakan olah saringan data Dapodik dan Emis dengan data kependudukan/SIAK untuk mengetahui jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah. dengan *baseline* data tersebut dapat menjadi acuan dalam penjarangan anak yang tidak sekolah untuk kembali ke sekolah sehingga dapat menaikkan capaian Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan ke depannya.

Dari data capaian SPM bidang Pendidikan Kabupaten Rembang perlu adanya keseriusan dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Rembang dalam mencapai target 100% sesuai dengan regulasi yang ada.

Data capaian SPM bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1. 2 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi				Capaian (%)		
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1.	Prosentase anak usia dini yang sudah tamat atau sedang belajar PAUD	Prosentase anak usia dini yang sudah tamat atau sedang belajar PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	88	89	90	92	88,74	85.65	87.72	na	100,8	96,23	97,46
2	Prosentase anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau	Prosentase anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang	94	95	96.18	96.65	91,08	95.24	96,18	na	96,89	100,25	100

	sedang belajar pada Pendidikan Dasar (SD)	sedang belajar pada Pendidikan Dasar (SD)	berpartisipasi dalam Sekolah Dasar (SD)											
3	Prosentase anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar pada Pendidikan Menengah Pertama (SMP)	Prosentase anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar pada Pendidikan Menengah Pertama (SMP)	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (SMP)	76	77	72,46	72,63	72,97	72,46	72,63	na	96,01	94,1	100,23
4	Prosentase partisipasi pendidikan kesetaraan usia 7-18 tahun	Prosentase partisipasi pendidikan kesetaraan usia 7-18 tahun	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3	4	5	na	2,16	3,67	3,89	na	72	91,75	77,8

Sumber: Renja Dindikpora Rembang tahun 2021

Dari data diatas menunjukkan adanya jarak yang besar antara target renstra dengan realisasi terlebih pada indikator Prosentase anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar pada Pendidikan Menengah Pertama (SMP) dan indikator Prosentase partisipasi pendidikan kesetaraan usia 7-18 tahun.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 9 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan di kabupaten Rembang pasal 8 huruf (e), 10,12 dan 14 berbunyi:

“Melaksanakan wajib belajar jenjang pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar jenjang pendidikan menengah. Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan seluas luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan. Masyarakat berkewajiban mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah

berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan”

Adanya Perda tersebut memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan Pendidikan. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah merupakan gerakan bersama untuk mengembalikan anak tidak sekolah kembali ke jenjang pendidikan sampai menyelesaikan pendidikan menengah atau sederajat. Tujuan adanya program ini yang tertuang dalam peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah salah satunya adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Kabupaten Rembang pada tahun 2021 menjadi 1 (satu) dari 4 (empat) kabupaten di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Pemasang, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Purbalingga melaksanakan kegiatan penanganan anak tidak sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kegiatan ini diberikan *branding* yaitu Gerakan Ayo Sekolah POL 12 Tahun (GASPOL 12). Program ini bertujuan untuk Memastikan agar setiap anak di Kabupaten Rembang memperoleh layanan pendidikan dan/atau pelatihan yang berkualitas dan tidak diskriminatif, Menjadi rujukan bagi Pemerintah Desa dalam mengembangkan inovasi kegiatan pendidikan bagi ATS, baik untuk mendukung kegiatan belajar di jalur pendidikan formal maupun pada jalur pendidikan nonformal dan informal, yangmana program ini terintegrasi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah kabupaten.

Anak Tidak sekolah yang dimaksudkan adalah Tidak pernah bersekolah sama sekali, Putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/MA sederajat,

Lulus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi transisi dari jenjang SD/MI, SMP/MTs sederajat.

Tahapan Penanganan ATS di antaranya:

1. Pendataan ATS

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melaksanakan pendataan ATS di Desa/Kelurahan. Pendataan ATS dilakukan setiap tahunnya berbasis sistem informasi dan manajemen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Identifikasi mastifikasi

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melakukan identifikasi ATS berdasarkan pendataan berdasarkan klasifikasi isu anak yang bekerja dan pekerja anak; anak terlantar; anak dalam perkawinan anak; anak penyandang disabilitas; anak yang mengalami kekerasan; faktor ketidakmampuan ekonomi; dan anak yang mengalami permasalahan sosial. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melakukan rekonfirmasi data ATS

3. Pengembalian ATS Bersekolah

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga memfasilitasi pengembalian ATS bersekolah meliputi:

- a. memfasilitasi ATS yang kembali ke sekolah pada sekolah formal;
- b. memfasilitasi ATS yang kembali ke sekolah pada sekolah nonformal;
- c. memfasilitasi ATS yang kembali ke sekolah pada sekolah inklusi yang ditetapkan; dan
- d. memfasilitasi ATS mengikuti program vokasi terintegrasi.

Pengembalian ATS bersekolah dilakukan dengan pemberian beasiswa diberikan kepada ats yang tidak mampu; advokasi yang meliputi asmsen konseling dan pendampingan; program orang tua asuh; dan merujuk ke lembaga kesejahteraan sosial anak.

4. Monitoring dan evaluasi

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan ATS di daerah. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim GASPOL 12 Kabupaten. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim GASPOL 12 kabupaten dilaporkan kepada Bupati setiap 1 tahun sekali.

Kenyataannya tahapan program tersebut masih memiliki beberapa kendala pada tahap pendataan, rekonfirmasi data, proses negosiasi pada anak tidak jarang tidak berhasil. Anak juga lebih memilih untuk tetap bekerja sehingga tidak ingin dikembalikan ke sekolah meskipun diberikan fasilitas gratis diantaranya pemberian beasiswa. Masih adanya kendala tersebut membuat tahap pengembalian anak ke sekolah tidak maksimal.

Terdapat perbedaan pendataan antara data yang diperoleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dengan data dari masing masing kecamatan melalui desa yang diinput di SIPBM ATS (Sistem Informasi Pembangunan Masyarakat). Hal tersebut dapat dilihat pada perbandingan table

Tabel 1. 3 data ATS Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Keterangan
Sumber	28	19	47	
Bulu	0	0	0	Ditelusuri Tahun 2024

Gunem	0	0	0	Ditelusuri Tahun 2024
Sale	0	0	0	Ditelusuri Tahun 2024
Sarang	146	114	260	
Sedan	75	61	136	
Pamotan	68	38	106	
Sulang	91	19	110	
Kaliori	0	0	0	Ditelusuri Tahun 2024
Rembang	75	37	112	
Pancur	48	35	83	
Kragan	101	54	155	
Sluke	115	105	220	
Lasem	79	29	108	
Kabupaten Rembang	827	511	1338	

Sumber: Data diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

Data tersebut merupakan data ATS yang diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang yang berbeda dengan data ATS yang diperoleh dari masing masing Kecamatan sebagaimana dapat dilihat pada table di bawah

Tabel 1. 4 data ATS desa oleh masing masing Kecamatan

Kecamatan	Total	keterangan
Sumber	44	Tahun 2022
Bulu	0	Ditelurusuri 2024
Gunem	0	Ditelurusuri 2024
Sale	0	Ditelurusuri 2024
Sarang	183	Tahun 2022
Sedan	278	Tahun 2022
Pamotan	240	Tahun 2022

Sulang	168	Tahun 2023
Kaliori	0	Ditelurusuri 2024
Rembang	71	Tahun 2023
Pancur	212	Tahun 2022
Kragan	311	Tahun 2022
Sluke	43	Tahun 2023
Lasem	98	Tahun 2023

Sumber: SIPBM 2023

Dilihat dari perbandingan tabel diatas mengindikasikan bahwa adanya perbedaan pendataan yang dilakukan dari desa dengan dinas Pendidikan. Perbedaan data yang diperoleh membuat penanganan atau intervensi yang dilakukan harus bekerja 2 kali dimana untuk memastikan bahwa target sasaran yang seharusnya masuk memang harus di intervensi atau mendapat program ini.

Tabel 1. 5 Tabel data ATS tertangani samapi 2023

Kecamatan	Jumlah ATS	ATS Kembali ke Sekolah	Keterangan
Sumber	47	11	
Bulu	0	0	Ditelusuri Tahun 2024
Gunem	0	0	Ditelusuri Tahun 2024
Sale	0	0	Ditelusuri Tahun 2024
Sarang	260	111	
Sedan	136	18	
Pamotan	106	12	
Sulang	110	54	
Kaliori	0	0	Ditelusuri Tahun 2024
Rembang	112	48	

Pancur	83	25
Kragan	155	19
Sluke	220	88
Lasem	108	31
Kabupaten Rembang	1337	417

Sumber: Data dinas Pendidikan

Data yang ATS yang terhimpun sampai tahun 2023 dari Dinas Pendidikan sebanyak 1.337 anak tidak sekolah (ATS). Namun, mereka yang berhasil kembali ke sekolah sekolah baru 417 anak atau sekitar 31% yang belum maksimal.

Pelaksanaan program GASPOL 12 Tahun harus didukung dengan faktor penunjang dalam implementasinya, hal ini sejalan dengan penelitian (Barmawi & Suranto, 2016) yang menemukan hasil bahwa peranan Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate dilihat pada sikap pekasana dalam merespon pelaksanaan kebijakan program wajib belajar 9 tahun memepngaruhi implementasinya. Berdasarkan wawancara singkat yang diperoleh dengan sub koordinator pembangunana sosial Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menyatakan

“Kita masih mengalami berapa kesulitan dalam program ini utamanya pada komunikasi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan pihak sekolah dan desa. Selain itu angka partisipasi sekolah yang ada di Kabupaten Rembang mengalami penurunan” (wawancara Kamis, 25 Mei 2023 pukul 07.30)

Besaran anak yang mengenyam pendidikan pada tingkat satuan tertentu dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah ini merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Angka partisipasi sekolah mengalami

penurunan pada tiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin kecil pula angka partisipasi sekolahnya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menjadi menjadi tolok ukur dalam melihat partisipasi bidang pendidikan di Kabupaten Rembang. Persentase capaian APS cenderung bersifat fluktuatif setiap tahunnya APS PAUD tahun 2016 sebesar 90,95% mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 85,63%. Penurunan juga terjadi pada APS SD/MI dan APS SMP/MTs. APS SD/MI tahun 2016 sebesar 99,44% menurun pada tahun 2021 menjadi 98,55% sedangkan untuk APS SMP/MTs tahun 2016 sebesar 99,69% namun di tahun 2021 menjadi 97,72%.

Peningkatan kualitas Pendidikan dapat dimulai dengan adanya Sarana prasarana penunjang Pendidikan baik Pendidikan formal maupun Pendidikan non formal (Annisa Putri et al., 2022). Saat ini jumlah sekolah formal yang tersedia di Kabupaten Rembang mulai tingkat SD/ sederajat sampai dengan SMA/ sederajat dan SMK sejumlah 594 unit yang tersebar di 14 kecamatan. yang dapat dilihat dari gambar dibawah

Gambar 1. 1 Jumlah sekolah di Kabupaten Rembang

No.	KECAMATAN	SD Sederajat			SMP Sederajat			SMA Sederajat			SMK			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
	TOTAL	365	59	424	44	64	108	11	25	36	6	20	26	594
1	Kec. Sumber	25	1	26	2	2	4	1	1	2	1	0	1	33
2	Kec. Bulu	18	3	21	2	1	3	0	1	1	0	1	1	26
3	Kec. Gunem	20	0	20	2	3	5	0	0	0	1	1	2	27
4	Kec. Sale	28	1	29	5	2	7	1	1	2	1	0	1	39
5	Kec. Sarang	29	8	37	3	11	14	0	4	4	0	1	1	56
6	Kec. Sedan	27	11	38	2	8	10	0	4	4	1	2	3	55
7	Kec. Pamotan	27	6	33	4	5	9	1	2	3	0	2	2	47
8	Kec. Sulang	23	1	24	3	2	5	1	1	2	0	1	1	32
9	Kec. Kallori	26	1	27	2	2	4	2	1	3	0	1	1	35
10	Kec. Rembang	42	7	49	6	8	14	2	3	5	2	7	9	77
11	Kec. Pancur	21	2	23	2	3	5	0	0	0	0	0	0	28
12	Kec. Kragan	36	7	43	4	7	11	1	3	4	0	0	0	58
13	Kec. Sluke	16	4	20	3	2	5	0	1	1	0	0	0	26
14	Kec. Lasem	27	7	34	4	8	12	2	3	5	0	4	4	55

Sumber: referensi data kemdikbud, 2021

Berdasarkan gambar jumlah sekolah negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Rembang menunjukkan adanya persebaran sekolah yang tidak merata pada setiap Kecamatan terutama pada jenjang SMA sederajat. Kecamatan Gunem dan Kecamatan Pancur tidak memiliki SMA baik negeri maupun swasta.

Sedangkan jumlah lembaga non formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar Kegiatan Belajar) di Kabupaten Rembang sampai saat ini berjumlah 17 unit dengan rincian pada gambar dibawah

Gambar 1. 2 Jumlah sekolah nonformal

NO.	NAMA PKBM	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN	ALAMAT LENGKAP
1.	MEKAR ARUM	KAJAR	LASEM	KEJAR PAKET B DAN C	Jl. KH. Baidhowi Desa Kajar Rt. 07 Rw. 02 Kec. Lasem
2.	AJI GINENG	TREMBES	GUNEM	KEJAR PAKET A, B DAN C	Desa Trembes Rt 07 Rw 01 Kec. Gunem Kab. Rembang
3.	WAHYU BHAKTI BINA MANDIRI	SUNTRI	GUNEM	KEJAR PAKET A, B DAN C	Desa Suntri Rt. 04 Rw. 01 Kec. Gunem Kab. Rembang
4.	BINA USAHA SEJAHTERA	MAGUAN	KALIORI	KEJAR PAKET B DAN C	Jl. Kaliori - Sumber Km 4 Desa Maguan Kecamatan Kaliori Kab. Rembang
5.	SRIKANDI MANDIRI	DRESI KULON	KALIORI	KEJAR PAKET B DAN C	Ds. Dresi Kulon Rt. 01 Rw. 02 Kec. Kaliori Kab. Rembang
6.	PUSAKA ILMU	SUMUR TAWANG	KRAGAN	KEJAR PAKET A, B DAN C	Desa Sumurtawang, RT.03, RW. 01 Kec. Kragan Kab. Rembang
7.	BINA REMAJA	PAMOTAN	PAMOTAN	KEJAR PAKET C	Desa Pamotan Rt 1 Rw 4 Kec. Pamotan
8.	NGUDI KAWRUH	SALE	SALE	KEJAR PAKET B DAN C	Desa Sale RT 03 RW 02 Kec. Sale Kab. Rembang
9.	JALA SAFIR	KALIPANG	SARANG	KEJAR PAKET B DAN C	Desa Kalipang Rt. 1 Rw. 5 Kec. sarang Kab. Rembang
10.	GEMILANG	SIDOMULYO	SEDAN	KEJAR PAKET B DAN C	Desa Sidomulyo Rt 01 Rw 04 Kec. Sedan Kab. Rembang
11.	TUHPATUS SHIBYAN	SIDOREJO	SEDAN	KEJAR PAKET A, B DAN C	Ds. Sidorejo RT 03 RW 01 kecc. Sedan kab. Rembang
12.	BUDI UTOMO	SENDANGMULYO	SLUKE	KEJAR PAKET B DAN C	Desa Sendangmulyo RT. 01/RW.01 Kec. Sluke Kab. Rembang
13.	NUR IHSAN	PEDAK	SULANG	KEJAR PAKET B DAN C	Jl. Landoh - Sumber km 2 Desa Pedak Rt. 04 Rw. 01 Kec. Sulang Kab. Rembang
14.	SEJAHTERA	SULANG	SULANG	KEJAR PAKET C	Jl. Sulang-Gunem KM 1 RT02/07 Desa Sulang, Kec. Sulang, Kab. Rembang
15.	SUMBER ILMU	LOGEDE	SUMBER	KEJAR PAKET B DAN C	Desa Logede RT 5 Rw 3 Kec. Sumber Kab. Rembang
16.	AR-ROHMAN KARANGASEM	KARANGASEM	BULU	KEJAR PAKET B DAN C	Desa Karangasem RT 05 RW 02 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang
17.	SKB	SUMBERJO	REMBANG	KEJAR PAKET B DAN C	Jl. Slamet Riyadi gg Merbabu Ds Sumberjo Kab. Rembang

Sumber: Dindikpora Kabupaten Rembang, 2020

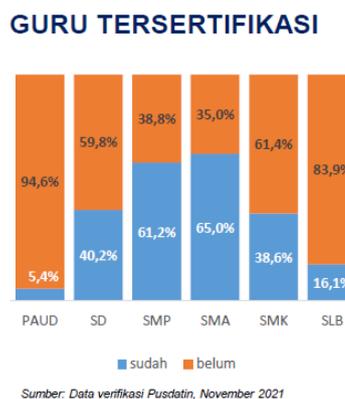
Dari data diatas kecamatan lasem terdapat 1 PKBM, kecamatan Gunem terdapat 2 PKBM, kecamatan kaliori terdapat 2 PKBM, kecamatan Kragan 1 PKBM, Kecamatan Pamotan 1 PKBM, kecamatan Sale 1 PKBM, kecamatan Sarang 1 PKBM Kecamatan Sedan 2 PKBM, Kecamatan Sluke terdapt 1 PKBM, kecamatan Sulang 2 PKBM, Kecamatan Sumber terdapat 1 PKBM, Kecamatan Bulu terdapat 1 PKBM dan pada Kecamatan Rembang terdapat 1 SKB. Sekolah Non formal juga tidak terdapat pada satu kecamatan yaitu kecamatan Pancur.

Satuan pendidikan khusus di Kabupaten Rembang sampai tahun 2021 adalah sejumlah 2 lembaga yaitu SLBN Rembang dan SLBN Lasem. Jumlah satuan pendidikan yang terbatas ini menjadi tantangan tersendiri mengingat secara geografis wilayah dari Kabupaten Rembang yang sangat luas. Disisi lain jumlah SLB di Kabupaten Rembang yang berjumlah 2 lembaga yaitu SLBN Rembang dan SLBN Lasem tidak mampu meng-cover pelayanan di seluruh wilayah.

Pengelolaan pendidikan menjadi penting untuk dibahas karena masih banyaknya anggapan bahwa tata kelola pendidikan masih kurang baik. Pengelolaan pendidikan yang kurang baik ini akan menimbulkan gap antara tujuan yang ingin dicapai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan (Nurfadlilah, 2017). Tata kelola pendidikan ini sendiri meliputi transparansi dan akuntabilitas, system pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen, serta efisiensi penggunaan sumber daya. (Lidda et al., 2022)

Sumberdaya Pendidik dan tenaga kependidikan menjadi penunjang kualitas Pendidikan (Barmawi & Suranto, 2016). Kualifikasi guru di Kabupaten Rembang masih terbilang kurang utamanya pada jenjang Paud dan SD. Data dari guru yang tersertifikasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2021 dapat dilihat berdasarkan gambar 1.3

Gambar 1. 3 Data guru tersertifikasi



Pada gambar tersebut presentase antara guru PAUD yang tersertifikasi hanya 5,4%. Guru SD yang tersertifikasi hanya 40,2%, guru SMP yang tersertifikasi 61,2%, guru SMA yang tersertifikasi hanya 38,6% dan guru SLB yang tersertifikasi hanya 16,1%. Dengan demikian presentase guru yang tersertifikasi masih rendah.

Berdasarkan latarbelakang diatas peneliti tertarik menelitti mengenai pelaksanaan Program GASPOL 12 Tahun dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, pada kajian ini peneliti mengambil judul “Implementasi Program GASPOL 12 Tahun (Gerakan Ayo Sekolah POL 12 Tahun) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kabupaten Rembang”

1.2 Rumusan Masalah

Identifikasi Masalah

1. Perbedaan data yang diperoleh anantara desa dan dinas
2. Tahap rekonfirmasi mengalami kendala yaitu antara ATS dengan petugas rekonfirmasi terkadang tidak berhasil melakukan negosiasi agar ATS mau kembali kesekolah
3. Komunikasi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku *leading sector*, OPD lainnya, sekolah dan desa masih mengalami kesulitan.
4. Angka Partisipasi Sekolah menurun pada tahun 2021
5. Sarana prasarana penunjang Pendidikan formal dan non formal masih belum merata dan kurang
6. Jumlah guru yang tersertifikasi masih rendah terutama pada guru PAUD, SD, SMK dan SLB

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program GASPOL 12 Tahun (Gerakan Ayo Sekolah POL 12 Tahun) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kabupaten Rembang?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Program GASPOL 12 Tahun (Gerakan Ayo Sekolah POL 12 Tahun) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kabupaten Rembang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Program GASPOL 12 Tahun (Gerakan Ayo Sekolah POL 12 Tahun) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kabupaten Rembang
2. Untuk menganalisis faktor penghambat Implementasi Program GASPOL 12 Tahun (Gerakan Ayo Sekolah POL 12 Tahun) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kabupaten Rembang

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan dilangsungkannya penelitian ini, maka ilmu pengetahuan dan juga wawasan terkait seperangkat teori kebijakan publik khususnya dalam proses perumusan kebijakan/formulasi kebijakan publik dapat terus didapatkan.

2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Dengan dilangsungkannya penelitian ini, peneliti dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh dari aktivitas pembelajaran selama periode perkuliahan.

b. Bagi instansi terkait

Penelitian ini dilangsungkan dengan harapan dapat memberikan solusi dan pandangan yang berasal dari pihak di luar organisasi terkait bagaimana Implementasi Program GASPOL 12 Tahun (Gerakan Ayo Sekolah POL 12 Tahun) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kabupaten Rembang

c. Bagi pembaca

Dengan dilangsungkannya penelitian ini, pembaca dapat memperoleh pengetahuan tambahan terkait Implementasi Program GASPOL 12 Tahun (Gerakan Ayo Sekolah POL 12 Tahun) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kabupaten Rembang

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Penelitian terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil
1.	Bashori, Septi Gia Aprima (2019)	Analisis Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Lampung PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan paradigma baru kepada masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Lampung yang berjumlah 4.444 jiwa dalam merawat pendidikan anak. Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang program wajib belajar 12 tahun sebetulnya merupakan langkah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program wajib belajar 12 tahun.	Dalam penelitian ini penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang program wajib belajar 12 tahun didasarkan pada minat dan bakat anak serta keinginannya untuk terus belajar dan meningkatkan potensi yang ada. Hal ini akan menjadi peluang untuk menerapkan kurikulum wajib belajar. Dengan begitu, program wajib belajar 12 tahun dapat terlaksana dengan baik dan bijaksana.
2.	Meysi Christi Rolos, Johny H. Posumah Very Y. Londa (2022)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan	Temuan penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil
		Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Administrasi Publik Unsrat	pendidikan gratis bagi siswa sekolah dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan menggunakan desain kualitatif.	gratis bagi siswa sekolah dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan dari segi pengorganisasian, penafsiran dan penerapannya.
3.	Wahyudi Barmawi, Suranto Suranto 2016	Analisis Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Ternate <i>Journal of Governance and Public Policy (2016)</i>	Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD dan SMP negeri di Kota Ternate; (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang meningkatkan mutu pendidikan. pendidikan; Ini tentang mencari tahu. Berkontribusi dalam penerapan kebijakan wajib belajar 9 tahun Peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Ternate akan berdampak pada .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program wajib belajar di Kota Ternate belum optimal. Hal ini terlihat dari sikap para pelaksana kebijakan Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate dalam menangani permasalahan yang muncul di sekolah. Beberapa sekolah masih mempunyai tenaga relawan yang banyak, satu gedung sekolah digunakan bergantian oleh dua sekolah, dan gedung perpustakaan SMPN 12 Pulau Moti sudah rusak dan belum diperbaiki. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil
			Teori yang digunakan saat ini merupakan pengantar kebijakan terkait pandangan Glyndwr dan Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	implementasi kebijakan wajib belajar di Kota Ternate belum optimal. Faktor yang mempengaruhi kebijakan wajib belajar adalah faktor temperamen. Faktor temperamen yang paling menentukan kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kota Ternate
4.	Lidda, Muh. Abid Alimuddin Tajuddin, M. Syariat Irfan, Irfan (2022)	Implementasi Program Pendidikan Gratis Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Malunda (SMPN 4 Malunda) Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi	Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pendidikan gratis di SMPN 4 Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.	Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di SMP Negeri 4 Malunda Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene telah meringankan biaya pendidikan bagi siswa terkait dengan proses pembelajaran. Program pendidikan gratis ini tidak sepenuhnya menghilangkan seluruh biaya pendidikan, termasuk pembayaran baju batik dan pakaian olah raga, karena sudah termasuk dalam biaya operasional sekolah. Selain itu, tidak ada lagi pembayaran

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil
				terkait proses studi melainkan biaya kepada mahasiswa dalam bentuk beasiswa miskin.
5.	Alfina Putri, Sumarlin Mus (2021)	Implementasi Program Pendidikan Inklusi di SD Negeri Unggulan Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program pendidikan inklusif di SDN Unggulan Mongisidi 1 Makassar Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.	Implementasi program inklusi telah dilakukan dengan sangat baik sehingga hingga saat ini pihak sekolah terus berjuang untuk mendapatkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah dengan terus menyediakan sarana prasarana pendukung pelaksanaan program serta dukungan lainnya.
6.	Eni Irawati (2017)	Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar Jurnal Supremasi	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi dari substansi hukum tersebut urgen diteliti mengingat pendidikan sebagai penentu kualitas sumber daya manusia	Penelitian hukum empiris di Kota Blitar menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar dalam kerangka sistem pendidikan nasional, memberlakukan kebijakan APBD Pro Rakyat dengan pendidikan gratis untuk semua jenjang pendidikan di Kota Blitar, dilengkapi penyediaan fasilitas gratis atas sepatu, seragam, buku, alat tulis, bus sekolah, tas, tablet, SPP, uang gedung, uang saku, dan

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil
				sepeda gratis. Kebijakan pendidikan APBD Pro Rakyat ini, mengalami sejumlah hambatan dari keluarga anak usia sekolah, kurang memadainya kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran Program Pendidikan Gratis, ketidakmerataan penyebaran lembaga sekolah, dan adanya perusahaan yang mempekerjakan anak sekolah menengah pertama.
7.	Abdul Rahman, Mawar, Retnowati Wahyuning Dyas Tuti, Nida Handayani, Muhammad Sahrul (2021)	<i>Key Determinants of Elementary School Education Policy Implementation in Border Region</i> Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana determinan kunci implementasi kebijakan pendidikan sekolah dasar di wilayah perbatasan dioperasikan, dengan Kecamatan Sekayam dan Entikong, Kabupaten Sanggau, Barat Provinsi Kalimantan sebagai lokus spesifik.	Penelitian ini menemukan bahwa determinan kunci implementasi kebijakan pendidikan sekolah dasar di daerah perbatasan yang terdiri dari dimensi: desain kebijakan, pemangku kepentingan, konteks, strategi implementasi tidak sepenuhnya optimal. Penelitian ini merekomendasikan beberapa

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil
				hal seperti: pemerintah perlu meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang lebih baik, memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah pemerintah, memperkuat perencanaan dan penganggaran, dan diperlukan evaluasi holistik dari penerapan E-Takola agar mekanisme bantuan yang diberikan kepada sekolah dasar di seluruh wilayah perbatasan bisa lebih banyak efektif.
8.	Zurqoni, Heri Retnawati, Janu Arlinwibowo, Ezi Apino (2018)	<i>Strategy and Implementation of Character Education in Senior High Schools and Vocational High Schools</i> <i>Journal of Social Studies Education Research</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi, implementasi dan hasil pendidikan karakter pada senior dan sekolah menengah kejuruan di empat provinsi di Pulau Jawa, Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang mungkin diterapkan sekolah dalam pendidikan karakter adalah membekali karakter membangun fasilitas dan merancang program-program pembangunan karakter yang baik. Sekolah dilaksanakan pendidikan karakter dengan memberikan keteladanan,

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil
				<p>intervensi, pembiasaan yang konsisten, dan penguatan. Itu hasil implementasi membuahkan hasil yang baik untuk pengembangan karakter siswa. Rintangan yang dimiliki sekolah dalam pendidikan karakter adalah heterogenitas siswa, paradigma masyarakat yang menilai bahwa fokus sekolah seharusnya pada pengembangan kognitif dan fasilitas yang terbatas</p>
9.	Emi Nurfadlilah (2017)	<p>Tata Kelola Pendidikan: Studi Tentang Gerakan Ayo Sekolah Di Kabupaten Bojonegoro Dilihat Dari Perspektif <i>Good Governance</i> Dan <i>Sound Governance</i></p> <p>Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro dilihat dari segi kebaikan pemerintahan dan pemerintahan yang sehat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan kualitatif pendekatan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen di Gerakan Ayo Sekolah jika dilihat dari perspektif tata pemerintahan yang baik masih perlu ditingkatkan dalam prinsip negara hukum, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Padahal jika dilihat dari segi sound governance masih perlu ditingkatkan dimensi kognisi dan nilai serta konstitusi.</p>

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil
10.	Safrida, Nila Safrida, Muhammad (2021)	Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Aceh Barat Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area	Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh Barat, disertai penguraian upaya implementasi dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan.	Hasil penelitian menunjukkan jika dalam implementasi kebijakan peningkatan kualitas pendidikan di Aceh Barat belum menunjukkan hasil maksimal, akibat ketebatasan anggaran pelaksanaan program, masih minimnya kerjasama antara dinas pendidikan dan masyarakat, terdapat banyak lembaga pendidikan tapi tidak di ikuti kuantitas siswa yang cukup dan minim serta terbatasnya kualitas maupun kuantitas pengajar di lokasi terpencil.

Pada penelitian yang ditulis oleh Bashori, Septi Gia Aprima (Bashori & Aprima, 2019) dengan judul Analisis Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Lampung memiliki perbedaan dengan penelitian yang saat ini diteliti yaitu pada lokus dan fokus. Penelitian tersebut lebih menekankan pada bagaimana cara membangkitkan minat dan semangat anak agar tetap melanjutkan ke sekolah.

Penelitian yang ditulis oleh Meysi Christi Rolos, Johny H. Posumah Very Y. Londa (ROLOS et al., 2022) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki perbedaan yaitu pada lokus dan fokus yang lebih menekankan pada pengorganisasian, aplikasi, dan interpretasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Suranto (Barmawi & Suranto, 2016) dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Ternate adalah lokus yang diteliti. Penelitian yang akan diteliti berlokus di kabupaten Rembang.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Lidda, Muh. Abid Alimuddin Tajuddin, M. Syariat Irfan, Irfan (Lidda et al., 2022) dengan judul Implementasi Program Pendidikan Gratis Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Malunda (SMPN 4 Malunda) Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene adalah pemfokusan pada bagaimana pembiayaan pendidikan pada SMPN 4 Malunda.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Alifina Putri Simarlin (Alfina Putri & Mus, 2021) yang berjudul Implementasi Program Pendidikan Inklusi di SD Negeri Unggulan adalah terdapat pada lokus dan fokus

yang berbeda. Fokus dari penelitian terdahulu hanya pada bagaimana sistem Pendidikan pada sekolah inklusi.

Perbedaan pada penelitian Eni Irawati (Irawati & Susetyo, 2017) berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar lebih berfokus pada bagaimana implementasi sesuai dengan hukum empiris sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana implementasi program pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Perbedaan penelitian dengan judul *Key Determinants of Elementary School Education Policy Implementation in Border Region* yang dilakukan oleh Abdul Rahman, (Rahman et al., 2021) adalah lebih ke fokus desain kebijakan, pemangku kepentingan, konteks strategi kebijakan sedangkan pada penelitian yang saat ini menggunakan teori George Edward III.

Penelitian yang berjudul *Strategy and Implementation of Character Education in Senior High Schools and Vocational High Schools* yang ditulis oleh Zurqoni, Heri Retnawati, Janu Arlinwibowo, Ezi Apino (Zurqoni et al., 2018) memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada lokus penelitian yaitu meneliti bagaimana penerapan Pendidikan karakternya

Pada penelitian oleh Emi Nur Fadilah yang (Nurfadlilah, 2017) berjudul Tata Kelola Pendidikan: Studi Tentang Gerakan Ayo Sekolah Di Kabupaten Bojonegoro Dilihat Dari Perspektif *Good Governance* Dan *Sound Governance* memiliki perbedaan yang terdapat pada lokus tata Kelola Pendidikan jika dipandang dari perspektif *good governance* dan *sound governance*

Pernelitian yang ditulis oleh Safrida, Nila Safrida, Muhammad (- et al., 2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Aceh Barat memiliki perbedaan pada lokus yang digunakan yaitu di Aceh Barat.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang berarti “*to serve*” yang dapat didefinisikan sebagai melayani atau memenuhi (dalam Anggara, 2016:13). Administrasi merupakan suatu upaya secara menyeluruh terhadap segala aktivitas yang berjalan di dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan organisasi tersebut (*goals and objectives*). Publik merupakan beberapa orang yang sama dalam hal berpikir, menyalurkan persaannya, harapan, sikap, dan tindakan sesuai dengan norma yang berlaku (Pasolong, 2014:6)

Beddy dalam (Pasolong, 2014) menyatakan administrasi publik merupakan proses dimana sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya (seperti modal, sarana dan prasarana, teknologi) diorganisir (organisasi) dikelola (fungsi manajemen) guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Nigro dan Nigro dalam (Pasolong, 2014) mengemukakan pengertian administrasi public adalah *public administration refers to cooperative efforts in a public setting* (merupakan usaha kerja sama kelompok dalam suatu susunan atau lingkungan). Menurut Nicholas Henry (Pasolong, 2014:8), administrasi publik merupakan perpaduan yang kompleks antara teori dan praktik yang tujuannya adalah untuk mengiklankan suatu pengertian terhadap pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang melaksanakan perintah. Administrasi publik juga meningkatkan respon kebijakan publik dengan tujuan pemenuhan kebutuhan sosial. Pemaparan inilah yang kemudian menjadikan administrasi merupakan upaya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai efektifitas dan

efisiensi di dalamnya. Perihal inilah yang dijalankan guna menerapkan praktik manajemen kebutuhan publik yang lebih optimal lagi.

Berdasarkan pengertian oleh beberapa ahli di atas, kesimpulan dari definisi administrasi publik yaitu kerja sama antarlembaga pemerintah atau sekelompok orang yang berhubungan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan pemerintah agar lebih peka terhadap kebutuhan publik.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi negara dirancang sebagai studi akademis menggunakan enam paradigma yang tumpang tindih. Setiap tahap paradigma memiliki karakteristik tertentu tergantung pada locus dan focus-nya. Locus menampakkan di mana area penelitian berada, dan focus menampakkan tujuan dari spesialisasi penelitian. Paradigma adalah hasil pemikiran orang-orang terkait perubahan dari ilmu pengetahuan yang telah ada terhadap suatu masalah krisis (Suwitri, 2008, hal. 10). Menurut Nicholas Henry dalam Thoha (2014, hal. 18) menjelaskan perkembangan paradigma administrasi publik sampai saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Paradigma Dikotomi antara Politik dan Administrasi Negara (1900-1926)

Fokus administrasi terbatas pada organisasi, tenaga kerja, dan penganggaran birokrasi, sedangkan pokok pikiran politiknya ialah perkara dalam pemerintahan, politik, dan kebijakan. Tokoh penting yang berpengaruh antara lain Frank J. Goodnow dan Leonardo D. White. Penekanannya terletak pada *locus*-nya yang berkaitan dengan di mana seharusnya administrasi publik berada. Paradigma pertama ini menghasilkan pemahaman yang lebih kuat tentang perbedaan antara dikotomi politik dan administrasi. Pokok pada

pemikiran ini, yaitu seharusnya politik tidak perlu mengganggu administrasi, dan administrasi negara harus menjadi suatu ilmu pengetahuan yang bebas nilai.

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1950an)

Administrasi negara menjangkau puncak ketenarannya. Tahun 1930-an, administrasi telah menerima banyak kontribusi berharga dari industri dan pemerintah, sehingga prinsip inilah yang muncul akibat pengetahuan manajemen yang semakin berkembang. Prinsip tersebut, bahwa administrasi negara dapat terjadi pada semua tatanan administrasi tanpa memedulikan lingkungan, fungsi, kebudayaan, misi, atau kerangka institusi. Tokoh-tokoh penting dari paradigma kedua ialah Mary Parker Follet, Willoughby, Henry Fayol, Gulick dan Urwick, Frederick W. Taylor.

3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950an-1970)

Dalam fase ini hubungan konseptual yang sebelumnya sudah ada antara ilmu politik dan administrasi ditetapkan kembali. Usaha yang ada dalam fase ini memiliki risiko yakni bidang yang dirumuskan harus berfokus pada keahlian yang esensial. Paradigma ini beranggapan bahwa studi administrasi negara memiliki perbedaan dari segi titik beratnya tetapi tetap bagian dari ilmu politik. Perkembangan baru dimasa ini, yakni timbul penggunaan studi kasus yang bersifat epistemologis (berkaitan dengan karakter, serta jenis pengetahuan), lalu timbul studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai satu bagian dari administrasi negara.

4. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Pada tahap ini, administrasi publik hanya menyediakan fokus, bukan locus-nya. Menurut paradigma keempat ini, administrasi publik yang merupakan bagian dari ilmu politik perlu disempurnakan lebih jauh dalam aspek yang selaras, yakni mengekspansi administrasi yang sepenuhnya didasarkan pada psikologi sosial dan yang lainnya berkaitan dengan kompleksitas kebijakan publik. Istilah ilmu administratif digunakan paradigma ini untuk menampakkan isi dan arah suatu percakapan. Ilmu ini mencakup pembahasan teori organisasi dan ilmu manajemen. Teori organisasi memberikan kontribusi signifikan dalam karya para sarjana di bidang psikologi sosial, administrasi perusahaan, dan sosiologi.

5. Paradigma 5 Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970)

Paradigma fase kelima adalah paradigma yang sudah dikembangkan dari paradigma sebelumnya. Ilmu administrasi negara adalah ilmu yang berhubungan dengan ilmu lainnya, jadi tidak terbatas hanya pada satu kebijakan. Administrasi negara berfokus pada berbagai teori yang mencakup analisis kebijakan publik. Manajemen modern, teknik administrasi, organisasi, persoalan aspirasi masyarakat, dan persoalan yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan. Sifat dari administrasi negara adalah kompleks yang di dalamnya mencakup penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diartikan luas. Hal tersebut dianggap sebagai hal yang mengaitkan antara focus administrasi negara dengan locus-nya.

6. Paradigma Governance (1990-sekarang)

Fokusnya adalah upaya menyusun, menggambarkan, mendisain, atau membuat organisasi berjalan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan secara maksimal. Menurut Ikeanyibe (2017, hal. 6) berpendapat bahwa penyedia layanan bertugas menggerakkan sementara pemerintah yang mengatur dan mengoordinasikan. Gibson dalam Ikeanyibe (2017, hal. 7) juga berpendapat bahwa *governance* melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, seperti sektor publik, dan sektor swasta.

Menurut Denhardt dan Denhardt dalam Ahmad (2012, hal. 8) menjelaskan perkembangan paradigma administrasi publik mulai *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), *New Public Service* (NPS) sampai ke *Good Governance*.

1. *Old Public Administration* (OPA)

Pada masa *Old Public Administration* (OPA) memiliki struktur yang hierarkis legalistik, dan sangat sentralistik. Wilson, yang dikenal sebagai orang pertama mendirikan ilmu administrasi negara mengungkapkan dalam bukunya “*The Study of Administration*” yaitu kapasitas administrasi pemerintah yang rendah menjadi masalah utama. Pemerintah menguasai dengan aturan yang mengikat dan terlalu ikut campur kedalam kehidupan masyarakat dalam arti tanpa melibatkan partisipasi baik dari pihak swasta maupun masyarakat. Hal ini menyebabkan tumpang tindihnya tujuan pokok dan fungsi yang ada pada tatanan birokrasi pemerintahan. Konsep kepentingan publik paradigma ini dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum yang juga ditandai dengan otoritas struktur organisasi top-down.

2. New Public Management (NPM)

New Public Management (NPM) ialah perbaikan dari *Old Public Administration* (OPA). Sektor publik dalam hal ini ditekankan untuk mengikuti sistem dari sektor privat dengan cara mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas. Para pemikir menekankan supaya kapasitas birokrasi diperkecil dengan mengurangi jumlah aparatur, hendaknya dilakukan pendelegasian ke sektor swasta dan mekanisme pasar. Inti dari paradigma ini, yaitu pemerintah yang kaku dalam *Old Public Administration* (OPA) harus dirubah dengan pemerintahan yang memiliki jiwa usaha tinggi untuk mewujudkan semangat kinerja yang tinggi.

3. New Public Service (NPS)

Paradigma *New Public Service* (NPS) merupakan sebuah kritikan terhadap *Old Public Administration* (OPA) dan *New Public Management* (NPM). Paradigma ini berpandangan bahwa kedua paradigma tersebut belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan, bahkan menyebabkan ketidakadilan dalam melayani rakyat. Rakyat seharusnya dianggap sebagai warga negara bukan klien seperti di *Old Public Administration* (OPA) dan *customer* seperti di *New Public Management* (NPM). Akan tetapi masyarakat ditempatkan sebagai warga negara dan pemerintah berkeinginan untuk melayani masyarakat.

4. Good Governance

Paradigma *good governance* datang untuk menyempurnakan konsep-konsep sebelumnya. Dalam paradigma ini, kebutuhan masyarakat menjadi terpenuhi karena adanya partisipasi dari banyaknya bermacam-macam pihak, seperti sektor publik, masyarakat, dan sektor swasta. Paradigma ini bertujuan untuk memperbaiki pelayanan yang diberi oleh aparatur birokrasi agar lebih berkualitas melalui support berbagai pihak. Adapun karakteristik *good governance* dari UNDP (United Nation Development Program), yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, dan strategic vision*.

Semua paradigma di atas menunjukkan bahwa orientasi administrasi public sudah berubah dengan cepat. Paradigma administrasi publik telah disebut gagal jika tidak ada respons terhadap kegagalan itu sendiri. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan dengan baik selain peran administrasi publik adalah perubahan paradigma dari seri ketepatan dan kecepatan responsnya. Pada penelitian ini cenderung pada cenderung pada New Public Service (NPS) karena harus berorientasi pada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.

1.5.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bentuk dalam pengambilan ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan urusan publik atau pemerintah yang akan dilaksanakan oleh publik dan pemerintah. Para ahli menjelaskan pengertian kebijakan publik, yaitu:

- a. Chandler dan Plano (1988:107)

Kebijakan publik adalah penggunaan secara efektif sumber daya yang tersedia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat maupun birokrasi.

b. Thomas R Dye (1981:1)

Kebijakan Publik adalah “*whatever government choose to do or nor to do*” atau pemerintah bebas memilih apa saja yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan.

c. Willy N. Dunn (1994)

Kebijakan publik merupakan beberapa opsi yang berhubungan dan ditentukan oleh suatu organisasi atau pemerintah di bidang-bidang yang telah ditetapkan dan menjadi tugas pemerintah, seperti kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain-lain.

d. Chaizi Nasucha (2004:37)

Kebijakan publik merupakan kekuasaan pemerintah untuk membuat kebijakan atau peraturan yang dapat dipakai kedalam peraturan hukum dengan tujuan agar hubungan sosial yang harmonis di lingkungan masyarakat dapat terjalin.

e. Anderson (1975)

Kebijakan publik merupakan bentuk kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat dan instansi pemerintah. Maka, berdasarkan penjelasan diatas kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah yang melewati berbagai tahap dan berfokus pada kepentingan atau kesejahteraan masyarakat. Lahirnya kebijakan publik membutuhkan beberapa tahapan. Tahapan ini merupakan kumpulan aktivitas intelektual yang dilakukan dalam perjalanan

aktivitas politik. Tahapan tersebut yaitu perumusan masalah, perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1.5.4 Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah bentuk ketetapan yang dikeluarkan pemerintah dimana terdapat peraturan-peraturan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah dan publik. Untuk menghasilkan kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, analisis kebijakan, dan evaluasi dari suatu kebijakan yang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun. (Andersen, 1984) dalam bukunya yang berjudul *public policy making* juga mengemukakan lima tahapan dari kebijakan publik, yaitu formulasi masalah, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi.

Gambar 1. 4 tahapan kebijakan



Berdasarkan gambar tahapan kebijakan dijelaskan beberapa tahapan dalam merumuskan kebijakan publik. Tahapan paling awal yang harus dilakukan pemerintah adalah penyusunan agenda, pada tahap ini pemerintah memahami apa yang menjadi prioritas kebutuhan dari seluruh masyarakat. Pemerintah harus dapat memilih dan menentukan prioritas kebutuhan dari aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat agar berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat, tidak hanya berdampak pada kesejahteraan beberapa kelompok saja. Dalam penyusunan agenda dapat dilihat berdasarkan masalah-masalah yang muncul di publik dan bagaimana Penetapan kebijakan publik juga berdasarkan keperluan dari kebijakan tersebut. Penyusunan agenda akan menghasilkan agenda pemerintah yang akan dibahas pada tahapan kedua yaitu formulasi kebijakan.

Tahapan kedua adalah formulasi kebijakan. Agenda pemerintah yang berisikan rumusan masalah yang telah ditentukan akan dibahas lebih lanjut dan detail oleh beberapa pemangku kebijakan di dalam forum khusus yang nantinya menghasilkan penetapan kebijakan yang akan dilakukan oleh seluruh masyarakat atau pemerintah di dalam negara atau daerah. Dalam formulasi kebijakan ini akan menghasilkan banyak alternatif kebijakan yang dapat diterapkan, sebelum pada akhirnya harus menetapkan satu kebijakan yang mana mendapatkan banyak dukungan dari peserta diskusi dan akan diterapkan. Setelah penetapan kebijakan, tahapan ketiga yaitu implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh seluruh *stakeholders* agar dapat mencapai tujuan di dalam kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan pemerintah memiliki

tugas sebagai pengawas agar berjalannya suatu kebijakan tersebut tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan. Setelah melakukan implementasi kebijakan, masyarakat memiliki hak untuk memberikan kritik dan saran untuk pemerintah tentang kebijakan publik tersebut. Kritik dan saran dari masyarakat nantinya akan digunakan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan terakhir yaitu evaluasi dari kebijakan publik yang telah dilakukan beberapa tahun oleh masyarakat. Evaluasi ini berdasarkan pada kritik, saran, kinerja dan dampak dari adanya kebijakan publik tersebut. (Andersen, 1975:171-172) mengelompokkan masalah yang akan dihadapi dalam melakukan evaluasi kebijakan, yaitu 1) ketidakjelasan dari tujuan kebijakan; 2) sebab-akibat; 3) dampak yang terjadi dari implementasi kebijakan tersebut; 4) kekuatan para pejabat; 5) anggaran dalam merumuskan kebijakan atau saat implementasi kebijakan; dan 6) bagaimana evaluasi dapat mengurangi dampak yang ada.

Pada Tahapan implementasi kebijakan publik juga dapat menimbulkan masalah baru, seperti lemahnya sistem atau proses implementasi tersebut. Dampak ini dapat terjadi kepada masyarakat, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka, dalam merumuskan kebijakan para pembuat kebijakan harus memperhatikan kemungkinan dampak-dampak yang nantinya dapat terjadi. Setelah melakukan evaluasi kebijakan public yang telah diterapkan, para pembuat kebijakan dapat merumuskan kembali kebijakan publik yang baru dengan mempertimbangkan kelemahan dan dampak dari kebijakan sebelumnya.

1.5.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan ketiga dalam tahapan pembuatan kebijakan publik. Dimana, tahap ini merupakan pelaksanaan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap ini diharapkan dapat berjalan dengan efektif agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Dibawah ini merupakan pengertian implementasi kebijakan menurut para ahli:

a. Grindle (1980)

Implementasi kebijakan tidak hanya berhubungan dengan mekanisme tentang keputusan politik ke dalam proses rutin melalui birokrasi, tetapi implementasi kebijakan juga berhubungan dengan konflik, keputusan siapa yang akan mendapatkan apa dari adanya kebijakan tersebut.

b. George Edward (2001)

Implementasi kebijakan adalah merupakan proses dinamis, memiliki beberapa faktor yang saling terkait dan dapat berdampak pada implementasi kebijakan.

c. Schubert (2002)

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan, tindakan, atau aktivitas. Implementasi tidak hanya tentang kegiatan, namun juga berkaitan dengan aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan dengan matang sesuai dengan acuan norma tertentu dalam mencapai tujuan kegiatan.

d. Hinggis (1985)

Implementasi kebijakan adalah ringkasan dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber daya lainnya yang ada agar sasaran strategi yang ditetapkan dapat tercapai.

e. Gordon (1986)

Implementasi kebijakan berhubungan dengan rangkaian kegiatan yang diarahkan pada perwujudan suatu program.

Berdasarkan pemaparan pengertian implementasi kebijakan dari para ahli, implementasi kebijakan merupakan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan untuk negara dan merupakan prosedur yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhinya.

1.5.6 Model Implementasi Kebijakan

Terdapat dua model pendekatan dalam implementasi kebijakan, yaitu *bottom-up* dan *top-down*. Menurut Pressman dan Wildavsky (1973), *top-down* merupakan pendekatan yang dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan implementasi kebijakan yang mengalami kegagalan. Namun, pendekatan ini menuai banyak kritik karena dianggap hanya mementingkan pembuat kebijakan. Berdasarkan kegagalan pendekatan tersebut, maka dibuat pendekatan *bottom-up*, pendekatan ini memasukan tujuan, jaringan kerja para aktor, aksi mereka, dan strategi. Dengan adanya pendekatan ini dapat mendorong masyarakat untuk melakukan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah tidak terlalu berpartisipasi.

Menurut Riant Nugroho (2011:618) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemenasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program

atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut Implementasi Program GASPOL 12 tahun ini dapat diamati dengan indikator menurut Riant Nugroho (2014: 686) mengemukakan bahwa keefektifan pelaksanaan suatu kebijakan dapat dilihat melalui “lima tepat” yaitu

1. Ketepatan Kebijakan,

Ketepatan kebijakan adalah kebijakan yang telah di buat memuat hal- hal yang memang harus dipecahkan. Suatu kebijakan dirasa tepat jika tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dan hasilnya dapat menyelesaikan masalah yang ada, dalam Riant Nugroho (2014: 686).

2. Ketepatan Pelaksanaan,

Ketepatan pelaksana adalah aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Aktor dalam implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah melainkan terdapat lembaga lain yang dapat menjadi pelaksana, dalam Riant Nugroho (2014: 686).

3. Ketepatan Target,

Ketepatan target adalah kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari target kebijakan, dalam Riant Nugroho (2014: 687). Indikator dalam ketepatan ini adalah ketepatan target penerima, target dalam kondisi siap untuk di intervensi, dan intervensi target dalam implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Ketepatan Lingkungan,

Ketepatan lingkungan adalah kebijakan yang telah dibuat telah sesuai dengan lingkungan kebijakan, seperti interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait, dalam Riant Nugroho (2014: 687). Indikator dalam ketepatan ini adalah keterkaitan lembaga- Lembaga pelaksana kebijakan dengan Lembaga lainnya, persepsi kelompok kepentingan akan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan sumber otoritas kebijakan

5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses adalah kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan proses di dalam implementasi kebijakan publik sehingga pelaksana kebijakan memahami tugas dan kelompok sasaran menerima dari kebijakan tersebut, dalam Riant Nugroho (2014: 688). Indikator dalam ketepatan ini adalah kesiapan pelaksana dalam menjalankan kebijakan dan kesiapan masyarakat dalam menjalankan kebijakan.

1.5.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi

Menurut Warwick (2008:17), pada implementasi terdapat dua kategori faktor yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu:

1. Faktor pendorong (*facilitating conditions*);

a. Komitmen Pimpinan Politik: dalam praktek adalah terutama komitmen dari pimpinan pemerintah karena pimpinan pemerintah pada hakekatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa didaerah.

b. Kemampuan Organisasi: dalam tahap implementasi program hakekatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas, seperti yang ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi.

c. Komitmen Para Pelaksana (*Implementers*): salah satu asumsi yang sering kali terbukti keliru ialah jika pimpinan telah siap untuk bergerak, maka bawahan akan segera ikut.

2. Faktor penghambat (*impeding conditions*).

a. Banyaknya 'Pemain' (*actors*) Yang Terlibat Semakin banyak pihak yang terlibat dan turut mempengaruhi pelaksanaan, makin rumit komunikasi makin besar kemungkinan terjadinya '*delay*' hambatan dalam proses pelaksanaan.

b. Terdapatnya Komitmen atau Loyalitas Ganda Dalam banyak kasus terjadi, pihak yang terlibat maupun seseorang yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan dalam menentukan ataupun menyetujui suatu proyek dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap proyek, waktunya tersita oleh tugas-tugas lainnya atau program lain.

c. Kerumitan yang Melekat pada proyek itu sendiri Dalam hal ini berupa faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan bahan dan faktor perilaku pelaksana atau masyarakat. Keempat, Jenjang Pengambilan Keputusan yang terlalu banyak makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilaksanakan. Demikian pula pada tahap operasi, penyaluran dana dan sumbangan yang diperlukan, memakan banyak waktu karena memerlukan persetujuan dari banyak pihak.

d. Faktor Lain: Waktu dan Perubahan Kepemimpinan Makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyusunan rencana dengan pelaksanaan, makin besar kemungkinan pelaksanaan menghadapi hambatan. Terlebih bila terjadi perubahan kebijakan. (Warwick ,2008:17)

Berdasarkan pendapat ahli diatas, terdapat dua kategori faktor yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yakni faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong suatu implementasi kebijakan harus memiliki suatu komitmen dari pimpinan karena pada dasarnya pimpinan politik lah yang berkuasa di daerah. Kemampuan organisasi juga menjadi faktor pendorong karena untuk melaksanakan tugas harus memiliki

1.5.8 Program GASPOL 12 Tahun

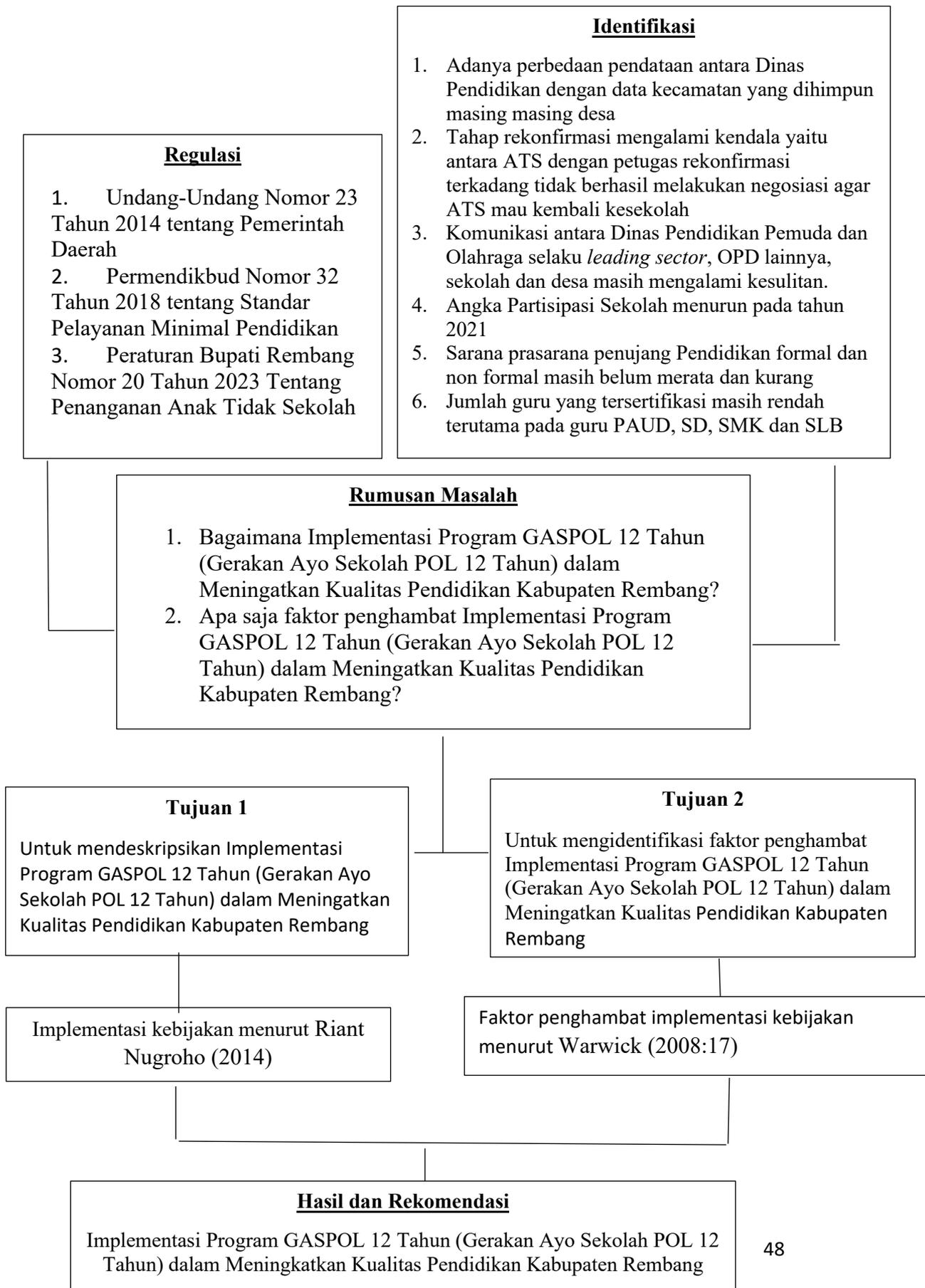
Kabupaten Rembang pada tahun 2021 menjadi 1 (satu) dari 4 (empat) kabupaten di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Pemasang, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Purbalingga melaksanakan kegiatan penanganan anak tidak sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kegiatan ini diberikan *branding* yaitu Gerakan Ayo Sekolah pol 12 Tahun (GASPOL 12). Program untuk mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) ini dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Rembang. Program ini disusun berdasarkan strategi nasional penanganan anak tidak sekolah. Meskipun begitu tetap mengacu kepada kondisi di daerah terutama kearifan lokal di masing-masing wilayah kecamatan.

Strategi intervensi ditujukan kepada anak yang saat ini tidak bersekolah atau berada di luar sistem pendidikan baik formal maupun nonformal. Strategi intervensi

bertujuan untuk menjangkau, mendaftarkan, mengembalikan dan mendampingi ATS ke dalam program pendidikan dan pelatihan yang relevan.

Strategi pencegahan bertujuan untuk menjaga agar peserta didik tetap bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya, dan melanjutkan ke jenjang berikutnya sampai tuntas Wajib Belajar 12 Tahun. Tujuan utama strategi pencegahan adalah untuk mengembangkan mekanisme pemantauan untuk mengetahui anak yang masih berada dalam sistem pendidikan atau pelatihan namun rentan atau beresiko putus sekolah.

1.5.8 Kerangka Pemikiran



1.6 Oprasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan proses yang bertujuan untuk menurunkan konsep-konsep penelitian menjadi bagian-bagian supaya lebih mudah untuk dapat dipahami, serta mudah untuk diukur. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Sugiyono (2012: 31), bahwa definisi operasional adalah penentuan sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang akan digunakan untuk meneliti, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara yang lebih baik.

1. Implementasi Program Gaspol 12 Tahun

Pada konteks pelaksanaan Program GASPOL 12 tahun, implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai suatu pelaksanaan atau aktualisasi nyata. Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan atau aktualisasi nyata dari surau kebijakan yang dirumuskan sebagai tanggapan dari suatu isu yang beredar di tengah masyarakat dan impleentasai kebijakan ini akan memecahkan permasalahan masyarakat dikarenakan oleh isu tersebut. Dalam konteks ini, perlaksanaan program GASPOL 12 Tahun diterapkan sebagai upaya meningkatkan angka partisipasi sekolah perlu melakukan penanganan anak tidak sekolah serta mengembalikan anak bersekolah yang saat ini masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah

Menurut Riant Nugroho (2011:618) Implemenasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemenasikan kebijakan publik, ada dua pilihan

langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi Program GASPOL 12 tahun ini dapat diamati dengan indikator menurut Riant Nugroho (2014: 686) mengemukakan bahwa keefektifan pelaksanaan suatu kebijakan dapat dilihat melalui “lima tepat” yaitu

1. Ketepatan Kebijakan,

Ketepatan kebijakan adalah kebijakan yang telah di buat memuat hal- hal yang memang harus dipecahkan. Suatu kebijakan dirasa tepat jika tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dan hasilnya dapat menyelesaikan masalah yang ada, dalam Riant Nugroho (2014: 686).

2. Ketepatan Pelaksanaan,

Ketepatan pelaksana adalah aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Aktor dalam implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah melainkan terdapat lembaga lain yang dapat menjadi pelaksana, dalam Riant Nugroho (2014: 686).

3. Ketepatan Target,

Ketepatan target adalah kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari target kebijakan, dalam Riant Nugroho (2014: 687). Indikator dalam ketepatan ini adalah ketepatan target penerima, target dalam kondisi siap untuk diintervensi, dan intervensi target dalam implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Ketepatan Lingkungan,

Ketepatan lingkungan adalah kebijakan yang telah dibuat telah sesuai dengan lingkungan kebijakan, seperti interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait, dalam Riant Nugroho (2014: 687). Indikator dalam ketepatan ini adalah keterkaitan lembaga- Lembaga pelaksana kebijakan dengan Lembaga lainnya, persepsi kelompok kepentingan akan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan sumber otoritas kebijakan

5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses adalah kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan proses di dalam implementasi kebijakan publik sehingga pelaksana kebijakan memahami tugas dan kelompok sasaran menerima dari kebijakan tersebut, dalam Riant Nugroho (2014: 688). Indikator dalam ketepatan ini adalah kesiapan pelaksana dalam menjalankan kebijakan dan kesiapan masyarakat dalam menjalankan kebijakan.

Tabel 1. 6 oprasionalisai konsep implementasi kebijakan

Gejala	Sub Gejala
Ketepatan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">• Ketepatan pemecahan masalah/ isu• Kesesuaian perumusan maslah/isu• Ketepatan lembaga penanganan
Ketepatan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">• Aktor implementasi program• Pengaruh pelaksana lembaga lain terhadap kebijakan

Ketepatan Target	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran implementasi kebijakan • Informasi kebijakan yang diperoleh penerima kebijakan • Intervensi target
Ketepatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • keterkaitan lembaga-lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lainnya, • sumber otoritas kebijakan • persepsi kelompok kepentingan akan kebijakan dan implementasi kebijakan
Ketepatan Proses	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Policy acceptance</i> • <i>Policy adaption</i> • Proses pelaksanaan implementasi program Gaspol 12 Tahun • Partisipasi masyarakat terkit program Gaspol 12 Tahun

2. Faktor penghambat Implementasi

Faktor pendorong dan penghambat implementasi menurut (Warwick, 1979), mengatakan bahwa dalam tahap implementasi kebijakan terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong (Facilitating conditions), dan faktor penghambat (Impending conditions). Meskipun sebelumnya telah ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, namun pada dasarnya terdapat dua faktor yang menjadi temuan implementasi kebijakan yaitu

faktor yang dapat menjadi pendorong dan menjadi penghambat terhadap pelaksanaan implementasi. Faktor-faktor pendorong dan penghambat merupakan hasil analisis dari permasalahan dan data pendorong, baik dari beberapa dokumen kebijakan, maupun dari observasi di lapangan.

Faktor penghambat implementasi diamati dengan gejala:

1. Komitmen Pimpinan Politik: dalam praktek adalah terutama komitmen dari pimpinan pemerintah karena pimpinan pemerintah pada hakekatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa di daerah.
2. Kemampuan Organisasi: dalam tahap implementasi program hakekatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas, seperti yang ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi.
3. Komitmen Para Pelaksana (Implementers): salah satu asumsi yang sering kali terbukti keliru ialah jika pimpinan telah siap untuk bergerak, maka bawahan akan segera ikut.
4. Banyaknya 'Pemain' (actors) Yang Terlibat Semakin banyak pihak yang terlibat dan turut mempengaruhi pelaksanaan, makin rumit komunikasi makin besar kemungkinan terjadinya 'delay' hambatan dalam proses pelaksanaan.
5. Terdapatnya Komitmen atau Loyalitas Ganda Dalam banyak kasus terjadi, pihak yang terlibat maupun seseorang yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan dalam menentukan ataupun menyetujui suatu proyek dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen

terhadap proyek, waktunya tersita oleh tugas-tugas lainnya atau program lain.

6. Kerumitan yang Melekat pada proyek itu sendiri Dalam hal ini berupa faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan bahan dan faktor perilaku pelaksana atau masyarakat. Keempat, Jenjang Pengambilan Keputusan yang Terlalu Banyak Makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilaksanakan. Demikian pula pada tahap operasi, penyaluran dana dan sumbangan yang diperlukan, memakan banyak waktu karena memerlukan persetujuan dari banyak pihak.
7. Faktor Lain: Waktu dan Perubahan Kepemimpinan Makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyusunan rencana dengan pelaksanaan, makin besar kemungkinan pelaksanaan menghadapi hambatan. Terlebih bila terjadi perubahan kebijakan. (Warwick ,2008:17)

Tabel 1. 7 Oprasionalisasi konsep faktor pendorog dan penghambat

Gejala	Sub Gejala
Komitmen Pimpinan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi yang ada terkait implementasi program GASPOL 12 tahun
Kemampuan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan teknis dalam implementasi program GASPOL 12 tahun • Kemampuan menjalin hubungan di dalam organisasi maupun dengan OPD lain yang bersangkutan dalam implementasi program GASPOL 12 Tahun

Komitmen Para Pelaksana (Implementers)	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif bagi para implementer program GASPOL 12 Tahun • Kesediaan untuk melaksanakan kebijakan
Banyaknya 'Pemain' (actors)	<ul style="list-style-type: none"> • Implementator yang terlibat • Kesesuaian tugas dan wewenang dari aktor
Terdapatnya Komitmen atau Loyalitas Ganda	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dari implementator • Insentif bagi implementator
Kerumitan yang Melekat pada program	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala dalam implementasi program • Eksternal dalam pelaksanaan program
Waktu dan Perubahan Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • Program bawaan pemimpin • Jangka waktu program dan hubungan kepemimpinan

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan yang dibahas adalah implementasi kebijakan Pendidikan. Setiap peneliti dalam penelitian terdahulu tersebut memiliki fokus dan lokusnya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan sebuah ide atau gagasan yang akan membuat penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini disusun dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan kajian dalam lingkup administrasi publik.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai implementasi program GASPOL 12 Tahun dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Rembang, yang nanti hasilnya dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik kedepannya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana peneliti lebih menekankan pada suatu analisis dan sekaligus penggambaran tentang kondisi realitas yang ada, sehingga hasil penelitian tersebut adalah banyak menghasilkan data deskriptif berupa kata kata atau tidak tertulis dari pelaku yang diamati. (Sugiyono, 2018) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara tringgulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisi data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

1.8.2 Situs penelitian

Situs penelitian adalah lokus pada penelitian. Lokus merupakan tempat atau wilayah dilaksanakannya penelitian. Lokus penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk subjek penelitian. Ada yang mengistilahkan informan memeberikan informasi tentang suatu kelompok atau entitas tertentu dan informan bukan diharapkan menjadi representasi dari kelompok atau entitas tersebut.

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2009:300), dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling dimana* informan yang dipilih adalah yang memang mengetahui dan paham dengan program GASPOL 12 Tahun ini yaitu dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Informan tersebut adalah Ketua Tim GASPOL 12 Tahun yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, Sekretaris GASPOL 12 Tahun yang menjabat sebagai Ketua Bidang Pengembangan PAUD dan PNF, PIC Program GASPOL 12 Tahun, masyarakat sasaran program.

1.8.4 Jenis Data

Sugiyono (2015) mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Contoh data kuantitatif yaitu data berupa angka dengan cara mengajukan kuesioner. Sedangkan data kualitatif dapat berbentuk data, sketsa, gambar, dan penelitian ini berupa nama dan alamat obyek wisata. Arikunto (1993:256) juga mengungkapkan jenis data terdiri dari dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif data yang dianalisis menggunakan statistik, sedangkan kualitatif data berupa kalimat yang memberi gambaran tentang apa yang diteliti.

Sumber data utama dalam penelitian yang bertipe kualitatif yaitu berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lainnya (Moleong, 2017). Data kualitatif merupakan hasil dari wawancara dengan subjek penelitian maupun observasi lapangan, sehingga data yang tersaji dalam bentuk pemaparan berupa teks atau kata-kata tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga data-data yang nantinya terdapat dalam penelitian ini akan lebih dominan berbentuk teks atau kumpulan kalimat yang menggambarkan informasi dari fenomena yang diteliti.

1.8.5 Sumber Data

Seluruh keterangan berkaitan dengan informasi yang dibahas dalam penelitian disebut sebagai sumber data. Di dalam penelitian ini, terdapat 2 jenis data yang digunakan oleh peneliti yakni Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber (informan). Data primer ini diperoleh melalui kegiatan tanya jawab atau wawancara antara peneliti dengan informan-informan terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia, jadi merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, seperti peneliti lain atau dari instansi. Data sekunder didapatkan melalui kegiatan studi kepustakaan atau

dokumentasi dari buku, jurnal, artikel, maupun laporan penelitian, serta dari berbagai dokumen yang resmi dan relevan dengan topik penelitian,

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Agar data yang didapatkan bisa memenuhi standar, maka peneliti perlu untuk mengetahui Teknik pengumpulan data yang baik dan benar. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan tidak hanya menggunakan satu teknik saja, namun dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara wawancara, studi kepustakaan, serta dokumentasi.

1. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini dominan menggunakan Teknik wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung kepada informan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan melakukan pencatatan dari proses tanya jawab tersebut. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (indepth interview). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam, namun tetap berkaitan dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti susun terlebih dahulu di dalam pedoman sehingga tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus penelitian. Wawancara pada penelitian yang dilakukan sejauh ini melibatkan informan dari pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang

2. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi atau pengamatan. Menurut Moleong (2017: 176), observasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu melalui cara berpartisipatif (partisipan) dan yang tidak berpartisipatif (non-partisipan). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tidak berpartisipatif (non-partisipan), karena di dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat untuk membantu pelaksanaan program GASPOL 12 Tahun, peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi objek penelitian.

3. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan ini merujuk pada upaya untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, serta analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi kepustakaan melalui hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan, undang undang, peraturan, rencana kerja, buku-buku, maupun artikel yang memuat konsep atau teori yang dibutuhkan.

4. Dokumentasi

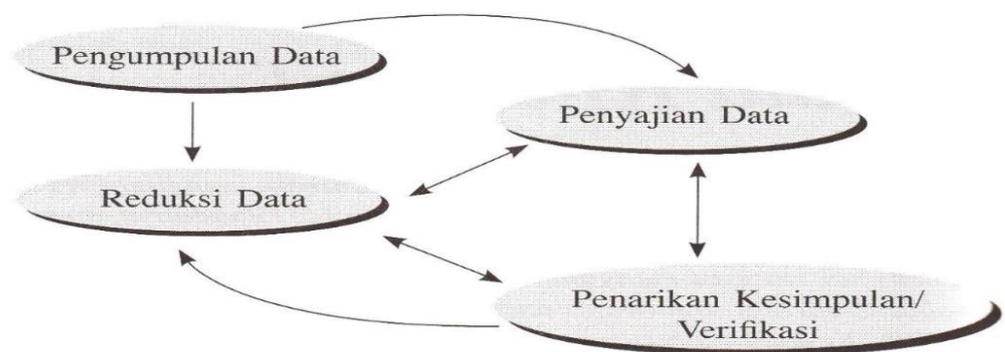
Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2018). Dokumentasi dalam penelitian ini turut dilakukan dengan mencari informasi atau data dari berbagai dokumen yang resmi dan relevan dengan apa yang akan

diteliti. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012: 240).

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014: 246), terdapat empat aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi).

Gambar 1. 5 Analisis Data



(Miles dan Huberman, 1992)

Keempat aktivitas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Dalam proses pengambilan data dapat juga sekaligus dilakukan analisis data. Datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang akan dapat langsung dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan akhir.

2. Reduksi Data

Semakin lama peneliti turun ke lapangan, maka jumlah data yang didapatkan akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Sehingga perlu dilakukannya reduksi data, yaitu kegiatan merangkum, memilih bagian yang pokok atau penting, memfokuskan pada hal penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam reduksi penelitian ini, peneliti merangkum hasil wawancara, mengambil data yang pokok dan penting, serta membuat kategorisasi (Sugiyono, 2018: 247).

3. Penyajian Data

Setelah data-data direduksi, langkah selanjutnya yaitu *mendisplay* atau menyajikan data. Dengan adanya penyajian data, maka data akan terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga nantinya akan semakin mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Namun, dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data yaitu menggunakan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data mengenai implementasi GASPOL 12 Tahun dengan menggunakan teks yang sifatnya naratif disertai dengan tabel maupun gambar.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah melakukan reduksi dan penyajian data, langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah melakukan penelitian di lapangan (Sugiyono, 2012:252-253).

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena akan menunjukkan bahwa data yang didapatkan oleh peneliti dapat dipercaya dan valid. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan atau kredibilitas data yang digunakan. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2012: 273). Oleh karena itu, terdapat tiga jenis triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut nantinya dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari beberapa sumber tersebut. Setelah menghasilkan kesimpulan, kemudian dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber-sumber data tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Jika nantinya menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, hanya saja sudut pandangnya yang berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data, misalnya data yang diperoleh dari hasil pengumpulan melalui wawancara di pagi hari akan memberikan data yang lebih valid, karena disaat itu narasumber masih segar dan belum ada banyak masalah sehingga data yang diberikan nantinya akan lebih kredibel.